

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan yang membuat masyarakat aktif dan inovatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki kondisi dan situasi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat tersebut akan terwujud jika masyarakatnya berpartisipasi. Jadi, kata kunci dari pemberdayaan meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.¹²

Program pemberdayaan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan dilapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.¹³

¹² Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hal. 8

¹³ Suhartini A. Halim, et. al. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 8

Keberhasilan dari kegiatan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹⁴

b. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori *empowering* adalah: *pertama*, membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua*, memampukan (*empowering*), pada tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil. *Ketiga*, perlindungan (*protektion*), yaitu proses penguatan atau perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.¹⁵

Menurut teori Dedeh Maryani, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu *pertama*, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan

¹⁴ Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 8

¹⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 188

masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan *kedua*, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

2) Tahap Pengkajian “*Assessment*”

Tahapan ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan kelompok atau individu. Dalam hal ini dilakukan identifikasi terkait masalah kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan. Dengan harapan program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir terkait masalah yang mereka hadapi serta bagaimana cara untuk mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang

paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan ide mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.¹⁶

5) Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

6) Tahap Evaluasi

¹⁶Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 13

Evaluasi yakni upaya pengawasan program pemberdayaan masyarakat yang sedang dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan adanya keterlibatan warga diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi.

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi yaitu memutuskan hubungan secara formal dengan komunitas yang dituju dengan harapan proyek harus segera berhenti. Maksudnya, masyarakat yang dibekali daya sudah mampu mengatur dirinya agar bisa hidup lebih baik melalui pengubahan situasi dan kondisi sebelumnya.¹⁷

c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu memerhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan kegiatan program pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip yaitu:

¹⁷ *Ibid.*, hal. 14

- 1) Prinsip kesetaraan: prinsip utama yang harus dipegang dengan kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan.
- 2) Prinsip kemandirian atau keswadayaan: merupakan lebih menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibandingkan bantuan pihak lainnya.¹⁸
- 3) Prinsip partisipasi: setiap pihak yang berhubungan memiliki kekuasaan dalam setiap tahap perencanaan dan pengelola.
- 4) Prinsip berkelanjutan: merupakan pengembangan kerjasama dengan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara ekonomi dan sosial.¹⁹

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1) Perbaikan Kelembagaan

Memperbaiki kelembagaan dilakukan dengan memperbaiki kegiatan/tindakan, seperti dengan mengembangkan jaringan dalam mitra usaha. Dengan adanya kelembagaan yang baik turut serta mendorong masyarakat agar berpartisipasi pada kegiatan kelembagaan, sehingga fungsinya akan maksimal. Para anggota saling mendukung dan memotivasi.

2) Perbaikan Usaha

¹⁸Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 11-12

¹⁹Sutrisno, *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hal. 17

Perbaikan usaha yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada para anggota lembaga itu dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan lembaga itu, sehingga dapat terpenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh para anggota.

3) Perbaikan Pendapatan

Dengan adanya perbaikan bisnis diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang didapatkan, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan

Pada saat ini, banyak lingkungan yang mengalami kerusakan oleh manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Apabila kualitas manusia tinggi dengan memiliki pendidikan yang tinggi atau intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

5) Perbaikan Kehidupan

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator atau faktor. Di antaranya yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Sehingga pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan pada setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaiki Masyarakat

Kehidupan kelompok masyarakat yang baik tercipta dari kehidupan setiap keluarga yang baik. Kehidupan ini didukung oleh lingkungan sosial dan fisik yang lebih bagus, sehingga mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.²⁰

e. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa pendekatan yang ditekankan pada proses pemberdayaan, sebagai berikut:

- 1) *Community organization*, yaitu ciri khas yang bermaksud untuk mengaktifkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan serta mengubah keadaan kehidupannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu (a) peran partisipan yangnikut dalam kepengurusan, (b) peran tutor sebagai penghubung, motivator, fasilitator dan pembimbing, (c) metode dan proses mengutamakan metode pemecahan masalah, mengorganisasi masyarakat sebagai kekuatan dasar.
- 2) *Participatory approaches*, merupakan pendekatan yang melibatkan setiap anggota dalam semua kegiatan, perlunya keterlibatan juga para pemimpin, tokoh masyarakat serta tenaga-tenaga ahli setempat.
- 3) *Education for justice*, yakni pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh

²⁰ Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 8-11

dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan serta.²¹

f. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dengan adanya strategi pemberdayaan masyarakat mampu melihat permasalahan dan cara mengatasinya dengan melibatkan masyarakat.

Pemberdayaan perlu diwujudkan melalui sejumlah strategi yang saling menunjang satu dengan yang lainnya, yaitu:

1) Komunikasi Aktif

Pemberdayaan membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam berkomunikasi secara aktif, serta membahas umpan balik dari pihak secara berkesinambungan, sehingga pemberdayaan akan mampu bergulir dengan baik.

2) Dukungan Struktur Organisasi

Pemberdayaan dapat berhasil jika didukung struktur organisasi. Struktur organisasi yang menunjang pemberdayaan akan memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan.

3) Mendorong Pengembangan Pribadi

Pemberdayaan mendorong pengembangan aspek individual sehingga setiap individu mampu mengambil keputusan serta memiliki kepercayaan diri dan tanggung jawab terkait dengan keputusannya.

²¹ Hiryanto, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal", dalam <http://staff.uny.ac.id>, diakses 11 September 2020 pukul 21.13

4) Fokus kepada Pelanggan

Pemberdayaan harus mampu mendorong peningkatan layanan sehingga pelanggan internal maupun eksternal akan puas terhadap kinerja.²²

Adapun program atau bentuk kegiatan pemberdayaan sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan politik, berarti meningkatkan daya tawar yang diperintah terhadap pemerintah. Birokrasi yang tangguh serta berdaya mempunyai kualitas kehidupan kerja yang optimal serta berorientasi pada partisipasi mengambil keputusan, program pengembangan karir, gaya kepemimpinan, derajat tekanan yang dialami oleh karyawan, dan budaya organisasi.
- b) Pemberdayaan ekonomi, sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, kegagalan program, pemikul beban pembangunan, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c) Pemberdayaan lingkungan, supaya pihak yang ditugaskan dan lingkungannya dapat mengkondisikan secara kontributif dan saling menguntungkan.
- d) Pemberdayaan sosial-budaya, berfungsi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan *human investment*

²² Donni Juni Priansa, *Perencanaan dan Penembangan SDM*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 227-228

guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan, dan pelaku yang adil terhadap manusia.²³

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam

a. Landasan Normatif

Semua yang ada di bumi ini mengalami perubahan. Islam memandang perubahan merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. Tetapi suatu perubahan harus berubah kearah yang lebih baik. Bahwasannya perubahan itu akan terjadi apabila suatu masyarakat itu berkeinginan untuk berubah sendiri. Masyarakat mempunyai usaha untuk merubah nasibnya agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 84 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Terjemah:

“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya”. (QS. Al-Isra’:84)²⁴

Sementara itu kebutuhan spiritual menghendaki pembangunan moral, pemuasan kebutuhan materi, menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya materi dalam suatu pola yang merata, sehingga semua kebutuhan umat manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, oleh karena itu, Islam menganggap mengemis sebagai

²³ Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 250

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Depok: Adhwaul Bayan (CV. Dua Sehati, t.t), hal. 290

profesi yang tidak selaras dengan martabat manusia sebagai khalifatullah. Oleh sebab itu setiap manusia sehat yang secara fisik dan mental, diharuskan untuk menopang dirinya dan keluarganya. Hal ini tidak mungkin terwujud kecuali apabila tersedia fasilitas untuk melatih mereka menjadi produktif melalui pengembangan kemampuannya dan juga diberikan kesempatan untuk berwirausaha dan bekerja untuk mendapatkan gaji. Pada akhirnya pemerataan pendapatan dan kekayaan tidak hanya dikuasai oleh golongan tertentu (orang kaya).²⁵

Pemberdayaan masyarakat sama halnya dengan istilah pemberdayaan umat sebagai upaya perbaikan-perbaikan masyarakat melalui reformasi sistem nilai dan sistem sosial masyarakat melalui proses pencerahan pikiran dan sikap mental masyarakat yang pada gilirannya melahirkan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang cinta dan rindu akan keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Pemberdayaan umat mengacu kepada surat Ar-Ra'ad ayat 11,²⁶ yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Terjemah:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'ad: 11)²⁷

²⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 9

²⁶ Asnawan, *Cakrawala Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2012), hal. 106

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan...*, hal. 250

b. Misi Pemberdayaan Menurut Islam

Pemberdayaan dalam Islam mengandung tiga misi diantaranya:

- 1) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis.
- 2) Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan umat Islam.
- 3) Membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.²⁸

c. Konsep Pemberdayaan dalam Islam

Konsep pemberdayaan dalam islam berkaitan dengan beberapa hal, yaitu :

- 1) Kesadaran tentang ketergantungan diri yang lemah dan yang tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat.
- 2) Kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan dunia bisnis.
- 3) Paham tentang strategi untuk “lebih baik memberikan kail daripada memberikan ikan” dalam membantu yang lemah, dengan kata lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian.

Semua itu dilakukan dengan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumberdaya manusia.²⁹

²⁸M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 389

²⁹ *Ibid.*, hal. 354

d. Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat

Lima aktualisasi nilai Islam dalam memberdayakan umat diantaranya :

- 1) Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.
- 2) Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki.
- 3) Pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.
- 4) Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar diartikan sebagai kehadiran tetapi kontribusi tahapan yang mesti dilalui oleh suatu dalam program kerja pemberdayaan masyarakat.

- 5) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya atau bekal yang cukup.³⁰

e. Prinsip Pengelolaan Program Pemberdayaan Menurut Islam

Menurut pandangan agama Islam, setiap pengelolaan program pemberdayaan agar bisa tercapai tujuan yang diharapkan maka setiap pengelolanya harus berdasar pada prinsip moral dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain :

1) Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam harta, orang amanah pandai menjaga titipan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang amanah pandai menjaga aib saudaranya.³¹ Sikap amanah harus dimiliki setiap orang, apalagi bagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Bagi seorang pengurus organisasi, sifat amanah sangatlah penting, jika seorang pengelola organisasi tidak memiliki sifat amanah, maka kepercayaan masyarakat sangat sulit di dapat. Hal ini seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfaal Ayat 27 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga*

³⁰Matthoriq et. al, “Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 3, t.t, hal. 428

³¹ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Ciputat: IMZ, 2012), hal. 95

*janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfaal Ayat 27)*³²

2) Kejujuran

Setiap manusia harus memiliki kejujuran dan harus selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan.³³ Seseorang harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah walaupun sangat beresiko.

Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (*mujahadah* dan *itqon*), baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) untuk kemudian diperbaiki secara terus menerus, serta menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu.

Dalam pengelolaan pemberdayaan kejujuran bisa berarti kejujuran tentang berapa jumlah dana yang diperoleh dari pemerintah, dan berapa pengeluarannya. Kejujuran atas tuntutan hidup bersama dengan kejujuran atas kualitas barang yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kerja sama dalam berusaha akan membuahkan hasil yang baik jika ada

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hal. 179

³³ Didin Hafidhuddin dan Handri Tanjung, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 72

kejujuran semua pihak. Tanpa ada kejujuran semua pihak, kejasama usaha tidak akan bertahan lama.³⁴

3) *Shiddiq*

Arti *shiddiq* adalah benar. Ini sifat utama yang juga harus dimiliki oleh pengelola program pemberdayaan. Kebenaran merupakan landasan tindakan apapun resikonya. Setiap tindakan punya resiko, artinya ambillah resiko yang terkecil madharatnya. Ingat, setiap tindakan dan perbuatan tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena tugas kita bukan sebagai pemuas, maka bertindaklah dengan benar.³⁵

4) Adil

Sifat adil harus dimiliki oleh pengelola suatu lembaga, sifat adil memiliki suatu pemahaman yang luas. Adil bukan hanya membantu secara imbang antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Adil ternyata harus bisa memberi kesempatan akses info bantuan untuk semua masyarakat. Adil juga memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Adil harus bebas dari kepentingan pribadi. Adil tidak boleh terpengaruh oleh apapun dan adil harus berlandaskan kebenaran dan koridor syari'ah.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hal. 73

³⁵ Sudewo, *Manajemen ZIS...*, hal. 99

³⁶ *Ibid.*, hal. 103

5) Kebersamaan/Kerjasama

Ketika suatu pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama, maka akan terasa ringan, kebersamaan atau kerjasama sangat diperlukan agar dalam melakukan kegiatan tidak merasa bosan dan malas, sistem ini merupakan system yang khas dari agama Islam.²²

f. Strategi Pemberdayaan dalam Islam

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan fiskal menurut Islam bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menurut Islam pengadaan pendidikan pada zaman sekarang harus dilakukan untuk setiap penduduk, maka dari itu anggaran pemerintah perlu diarahkan kepada pendidikan dasar dan menengah.

2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Pengadaan *market good* dan *private good* sudah seharusnya dilakukan oleh negara dan lembaga-lembaga swasta. Misalnya mengenai penyediaan air bersih atau air minum di daerah-daerah yang langka air. Negara mempunyai kewajiban untuk pengadaannya. Disini masyarakat lokal bisa mengambil prakarsa untuk pengadaan air secara swadaya, tentu saja dengan bantuan masyarakat setempat.

3) Menggratiskan fasilitas kesehatan

Kesehatan memang merupakan *private good* masyarakat. Tetapi meskipun begitu pengadaannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, pemerintah bisa membantu dengan menyediakan *primary health care*, atau kesehatan umum (*public health*) yang tergolong kedalam *public good*. Dengan kata lain kesehatan dasar adalah suatu *collective good* yang diputuskan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.

4) Memberantas kemiskinan dan kepincangan pendapatan masyarakat, dalam artian pemerintah dapat membuat proyek-proyek padat karya untuk masyarakat, pembentukan unit-unit usaha yang bersifat kekeluargaan dan kerjasama.³⁷

3. Program Maya Juwita

a. Pengertian Program Maya Juwita

Program Maya Juwita (Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata) merupakan tatanan lingkungan yang berada di kelurahan yang memenuhi kriteria kunjungan wisata dengan memperdayakan masyarakat pada lingkungan sekitar terutama masyarakat miskin serta institusi kemasyarakatan yang perlu diperdayakan. Dengan tujuan supaya mampu mengidentifikasi potensi dan masalah di masyarakat di kelurahan itu sendiri serta memberikan alternatif solusi dan mengawasi

³⁷ Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi...*, hal. 70-72

kegiatan yang mampu menyelesaikan masalah itu dengan pengelolaan yang partisipatif, aspiratif, akuntabel serta transparan.³⁸

b. Dasar Pelaksanaan Program Maya Juwita

Adapun dasar pelaksanaan Maya Juwita adalah sebagai berikut:

- 1) Misi ke-3 Pemerintah Kota Blitar: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- 2) Perwali No. 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (Maya Juwita) Kota Blitar.
- 3) Perwali No. 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perwali nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (Maya Juwita) Kota Blitar.
- 4) Perwali No. 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar.

Program Maya Juwita diantaranya dilakukan dengan menggagas munculnya Kampung Wisata Kreatif. Kampung-kampung wisata ini diharapkan dapat menambah destinasi-destinasi wisata baru di Kota Blitar. Kampung Wisata Kreatif dipilih untuk memajukan pariwisata Kota Blitar karena dilatarbelakangi bahwa Kampung-kampung yang

³⁸ Edy Wasono dan Eka Askafi, "Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (Maya Juwita) di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar". *Revitalisasi*. Vol. 7 No. 4, 2018, hal. 340

terdapat di perkotaan dan masyarakat bagian penting dari penciptaan kota yang tangguh.³⁹

c. Kegiatan Program Maya Juwita

Program Maya Juwita menitikberatkan pada kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan:

- 1) Penyedia sarana dan prasarana dasar lingkungan yang meliputi pengelolaan kebersihan, pengelolaan lingkungan kondusif wisata, penanganan limbah dan sampah, penataan lingkungan kampung hijau, penyediaan air bersih, serta pengelolaan drainase lingkungan.
- 2) Fasilitasi pengembangan usaha produksi masyarakat dalam menciptakan produk dan layanan pariwisata yang khas di masing-masing kelurahan.
- 3) Pelatihan/kursus yang ditindaklanjuti program pembinaan, promosi dan pemasaran.⁴⁰

d. Pengembangan Wisata

Pengembangan suatu wilayah adalah upaya terhadap pemanfaatan potensi yang dimiliki sehingga tercipta sesuatu yang lebih baru dari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memacu perkembangan sosial

³⁹ Tim Litbang Bappeda Kota Blitar, *Kompilasi Kajian Litbang*, (Blitar: Bappeda Kota Blitar, 2017), hal. 16-17

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 341

ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam mengembangkan suatu kawasan wisata terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Faktor internal

Terdiri dari potensi wilayah yang berupa Sumber Daya Alam, sumber daya Manusia, dan Sumber Daya Buatan.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal ini membutuhkan ruang dan prasarana wilayah untuk dapat memanfaatkan lahan yang terbatas agar dapat berkembang.⁴¹

Mengembangkan suatu kawasan wisata berarti usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik budaya, dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia. Kegiatannya meliputi membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.⁴²

Berikut adalah beberapa faktor daya tarik wisata, yaitu:

- 1) Faktor alami, seperti iklim dan keindahan alam.
- 2) Faktor sosial, seperti bentukan arsitektur dan budaya lokal.
- 3) Faktor kesejarahan.
- 4) Sumber daya rekreasi.

⁴¹ Hadi Susilo Arifin, dkk, *Potensi Agrowisata di Pedesaan*, (Bogor: Biro Perencanaan Pertanian, 2009), hal. 5

⁴² Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 148

5) Sarana teuristik, seperti jalan, utilitas, dan pelayanan.⁴³

4. Agrowisata

a. Pengertian Agrowisata

Dalam istilah sederhana, agrowisata (*agritourism*) didefinisikan sebagai perpaduan antara pariwisata dan pertanian yang pengunjungnya dapat mengunjungi kebun, peternakan atau kilang anggur untuk membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian aktivitas, makan suatu makanan atau melewati malam bersama di suatu areal perkebunan atau taman.⁴⁴

Di Indonesia, agrowisata atau *agroturisme* didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.⁴⁵

Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (*eco-tourism*), yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di lingkungan alamnya serta sebagai sarana pendidikan.

⁴³ Lina Azizah, *Perencanaan Kebun Praktek Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Kampus Cibalagung untuk Menunjang Wisata Edukasi*, (Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal. 5-6

⁴⁴ I Gusti Bagus Rai Utama dan I Wayan Ruspenti Junaedi, *Agrowisata sebagai Pariwisata Alternatif di Indonesia: Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan*, (Denpasar: Deepublish Publisher, 2015), hal. 30

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 30

Ekowisata dan wisata agro diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan gairah untuk meningkatkan usaha kecil seperti kerajinan rumah tangga, pertanian, dan bidang usaha lainnya karena wisatawan *ecotourism* adalah wisatawan yang bersentuhan langsung dengan penduduk lokal yang objeknya dikembangkan.⁴⁶

b. Model Pengembangan Agrowisata

Dalam pengembangan Agrowisata dibutuhkan kerjasama sinergis diantara pelaku yang terlibat dalam pengelolaan Agrowisata, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah.

Pendekatan pengembangan agrowisata, meliputi:

- 1) Pengembangan berbasis konservasi, dimaksudkan pola pembinaan yang tetap mempertahankan keaslian agro-ekosistem dengan mengupayakan kelestarian sumber daya alam lingkungan hidup, sejarah, budaya, dan rekreasi.
- 2) Pengembangan berbasis masyarakat, dimaksudkan pola pembinaan masyarakat yang menempatkan agro wisata sebagai pemberdayaan masyarakat petani untuk dapat memperoleh nilai tambah baik dari sisi hasil pertanian maupun dari kunjungan wisatawan dan efek ganda dari penyerapan hasil pertanian oleh usaha pariwisata dan pengembang.
- 3) Penetapan wilayah atau daerah agro wisata sebagai daerah atau

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 32

wilayah pembinaan.

- 4) Inventarisasi kekuatan agrowisata.
- 5) Peranan lembaga pariwisata dan lembaga pertanian dalam pembinaan agro wisata.⁴⁷

Untuk dapat mengembangkan kawasan agrowisata ada lima unsur yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

1) *Attractions*

Dalam konteks pengembangan agrowisata, atraksi yang dimaksud adalah hamparan kebun atau lahan pertanian, keindahan alam, keindahan taman, budaya petani tersebut serta segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian tersebut. Pengunjung dapat melakukan aktivitas seperti:⁴⁸

- a) Menikmati pemandangan atau fotografi
- b) Jalan-jalan, jogging, bersepeda
- c) Bermain dan rekreasi keluarga
- d) Memetik buah-buahan, sayur mayur, menikmati keindahan taman bunga
- e) Menanam bibit
- f) Berkemah
- g) Kegiatan outbound
- h) Mengamati lokasi flora
- i) Memancing

⁴⁷ Gumelar S. Sastrayuda, *Concept Resort and Liesure Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Liesure*, (Jakarta: t.p., 2010), hal. 3

⁴⁸ *Ibid.*, hal 26

2) *Facilities*

Fasilitas yang diperlukan mungkin penambahan sarana umum, Seperti Pos keamanan, tempat sampah, Masjid atau musola, Kamar mandi atau toilet, Rumah makan atau restaurant, Wartel, Shelter, Toko cinderamata, Pusat informasi atau TIC, Kendaraan warawiri, Panggung hiburan, Brosur atau *guide book*, Petunjuk arah, Museum botani, Perpustakaan, Shopping arcade atau pertokoan .

3) *Infrastructure*

Infrastruktur yang dimaksud dalam bentuk sistem pengairan, Jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, sumber listrik dan energi, sistem pembuangan kotoran atau pembungan air, jalan raya dan sistem keamanan.

4) *Transportation*

Transportasi umum, terminal bis, sistem keamanan penumpang, system informasi perjalanan, tenaga kerja, kepastian tarif, peta kota atau objek wisata.

5) *Hospitality*

Keramah-tamahan masyarakat akan menjadi cerminan keberhasilan sebuah sistem pariwisata yang baik.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hal 55

5. Pariwisata Syariah

a. Pengertian Pariwisata dalam Islam

Pariwisata dalam bahasa Arab disebut *rihlah* yang artinya perjalanan. Selain kata *rihlah*, perjalanan dalam bahasa Arab juga diungkapkan dengan istilah lain seperti kata *safara* (سافر) dan *sara* (سار).⁵⁰ Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari suku kata “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, berkeliling, atau bersama dan “wisata” artinya bepergian atau perjalanan. Jadi, pariwisata berarti suatu kegiatan perjalanan atau bepergian yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bermacam-macam, seperti rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu) atau semisal itu, bukan untuk mengais rezeki, bekerja dan menetap.⁵¹

Pariwisata atau turisme dapat dikatakan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Selain itu, dalam agama Islam pariwisata selalu dikaitkan dengan ibadah, atau bepergian untuk mengingat Allah SWT, seperti haji dan lain sebagainya.⁵²

Secara fundamental wisata syariah adalah pemahaman makna syariah disemua aspek kegiatan wisata mulai dari penginapan, sarana

⁵⁰ Rahmi Syahriza, “Pariwisata Berbasis Syariah”. Human Falah. Vol. 1 No. 2, 2014, hal.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 136

⁵² *Ibid.*, hal. 136-137

transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh misalnya dalam hal syariah guest house tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya yang tidak terikat dalam perkawinan. Selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman berakohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan dalam Islam.⁵³

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, Islam selalu menyerukan agar manusia dalam bepergian dan bergerak menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini diungkapkan dalam al-Qur'an dengan menggunakan bentuk *amr* (perintah). Allah SWT menyerukan kepada manusia agar melakukan perjalanan yang diiringi dengan memperhatikan dan men-*tadabbur* apa yang mereka lihat tersebut. Hal ini berarti bahwa manusia akan mendapatkan nilai plus pada rihlah jika diiringi dengan *tadabbur*, karena *tadabbur* akan mengingatkan mereka dengan posisinya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Jadi bukan hanya kesenangan saja yang didapat dari rihlah itu tetapi pahala atau ganjaran dari Allah SWT juga akan diraih.

Islam membagi bepergian atau perjalanan dalam lima kelompok:

- 1) Bepergian untuk mencari keselamatan seperti hijrah yaitu keluar dari negara yang penuh *bid'ah* atau dominasi haram.

⁵³ Kurniawan Gilang Widagyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia". The Journal of Tahidinomics Vol. 1, No. 1, 2015, hal 75.

- 2) Bepergian untuk tujuan keagamaan seperti menuntut ilmu, menunaikan ibadah haji, jihad di jalan Allah, berziarah ke tempat-tempat mulia, mengunjungi kerabat atau saudara karena Allah, dan bepergian untuk mengambil ibrah atau menegakkan kebenaran dan keadilan.
- 3) Bepergian untuk kemaslahatan duniawi seperti mencari kebutuhan hidup, mencari nafkah.
- 4) Bepergian karena urusan kemasyarakatan seperti menengahi pertikaian, menyampaikan dakwah, bermusyawarah.
- 5) Bepergian untuk kepentingan turisme atau kesenangan semata.⁵⁴

Islam datang untuk meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia, di antaranya:

- 1) Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya *safar* - atau wisata- untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu dan umrah.
- 2) Demikian pula, dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya.
- 3) Wisata dalam rangka mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat.

⁵⁴ Rahmi Syahriza, "Pariwisata Berbasis Syariah". *Human Falah*. Vol. 1 No. 2, 2014, hal. 138-139

- 4) Wisata dalam rangka berdakwah kepada Allah Ta'ala seperti yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul yang telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar.
- 5) Safar atau wisata untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.⁵⁵

Jadi, dalam ajaran islam pun telah diterangkan secara jelas tentang diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan tertentu yang diantaranya adalah:

1. Untuk beribadah seperti haji dan umrah
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama seperti ke tempat yang menyimpan sejarah tentang islam
3. Untuk berdakwah dan menyiarkan agama islam
4. Pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya
5. Menikmati indahnya alam yang indah sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hal 139-140

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 141

b. Pariwisata untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Syariah

Industri pariwisata salah satu investasi bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena dengan adanya pariwisata, akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Selain itu juga bisa memberikan motivasi bagi setiap individu untuk berkreasi dan berinovasi.

Mengembangkan industri pariwisata yang berbasis syariah juga merupakan sebuah kontribusi untuk lebih mengembangkan dan menerapkan konsep ekonomi syariah. Syariah tidak hanya untuk perbankan, tetapi apapun bentuk transaksi ekonomi dan bisnis selain perbankan juga perlu dikembangkan berdasarkan konsep syariah. Konsep syariah dapat diterapkan dalam semua aspek seperti dari agen atau biro perjalanan wisata yang mengatur berbagai macam jenis dan tujuan perjalanan.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program maya juwita di Agrowisata Belimbing Karang Sari Kota Blitar. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 143

1. Penelitian Rindi⁵⁸ dengan judul Skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)” tahun 2019 berisi bahwa Desa Wonokarto memiliki potensi yang cukup besar terutama dalam bidang pariwisata, seperti kerajinan bambu yang dikelola oleh kelompok paguyuban guyub rukun, *grasstrack*, dan embung tirtayasa yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (Podarwis) Wonokarto. Langkah-langkah pengembangan dari potensi pemberdayaan masyarakat dimulai pada tahap perencanaan dengan melakukan musyawarah masyarakat Desa Wonokarto, kemudian tahap implementasi dengan adanya keterlibatan semua masyarakat Desa Wonokarto, dan selanjutnya tahap pengawasan masyarakat yang diawasi dan di kontrol dalam upaya pengembangan desa wisata.

Persamaan: dalam penelitian tersebut persamaannya terdapat ada jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu persamaan yang terdapat dalam penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dengan potensi yang ada pada lokasi tersebut serta terkait langkah atau proses pengembangan potensi.

Perbedaan: perbedaan terletak pada obyek penelitian yang mana dalam penelitian Rindi obyeknya fokus pada kerajinan bambu, *grasstrack* dan embung tirtayasa sedangkan penelitian saya obyeknya pada agrowisata belimbing.

⁵⁸ Tyas Arma Rindi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*, (Metro: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 80

2. Penelitian Apriyani⁵⁹ dengan Skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan” tahun 2019 berisi bahwa terdapat tiga proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Kunjir yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Dalam tahap penyadaran, lebih ditekankan pada kegiatan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Tahap pengkapasitasan berupa pemberian kapasitas kepada masyarakat supaya menjadi masyarakat yang berkualitas, mandiri serta memiliki kemampuan melalui pengembangan secara formal seperti pemberian pelatihan-pelatihan maupun secara nonformal. Pada tahap pemberdayaan berupa pemberian kuasa kepada masyarakat dengan memberikan peluang untuk mengelola semua bentuk kegiatan yang ada dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Persamaan: dalam penelitian tersebut persamannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu persamaan yang terdapat dalam penelitian terkait sama-sama bertujuan mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di lokasi penelitian serta terkait terbentuknya lapangan pekerjaan pada daerah sekitar kawasan.

Perbedaan: terletak pada obyeknya, di penelitian oleh Apriyani obyeknya di desa wisata Kunjir yang fokus di kawasan pulau-pulau, pantai, air terjun

⁵⁹ Ledina Apriyani, *Pemberdayaan Masyarakatn Berbasis Potensi Lokal di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 105

dan sumber wisata alam. Akan tetapi dalam penelitian saya berfokus pada agrowisata belimbing yang sebagai tanaman utama dari Kelurahan Karang Sari.

3. Menurut penelitian Mustangin⁶⁰ dalam Jurnal Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji” tahun 2017 berisi bahwa Desa Bumiaji memiliki kawasan pertanian dan sekaligus kawasan wisata berbasis alam dengan wisata petik apel yang merupakan salah satu unggulannya. Bentuk pemberdayaan masyarakat dengan adanya perilaku yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program desa wisata. Selain keterlibatan masyarakat pada wisata petik apel, masyarakat dapat memanfaatkan buah apel diolah dalam berbagai macam olahan makanan baru yang dijadikan sebagai oleh-oleh dengan dibentuknya *home industry*. Masyarakat juga menyediakan *homestay* untuk pengunjung. Selain itu, juga dilakukan dalam atraksi seni budaya yang menambah daya tarik.

Persamaan: penelitian tersebut persamannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Kesamaan lain yaitu pengunjung yang dapat memetik buah dan menikmati pemandangan selama di dalam kebun. Selain itu juga terdapat keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengolah buah hasil kebunnya untuk di jual ke wisatawan.

⁶⁰ Desy Kusniawati, Nufa Pramita Islami, Baruna Setyaningrum, dan Eni Prasetyawati, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji”, *Sosioglobal*, Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 72

Perbedaan: penelitian tersebut tidak membahas proses pemberdayaan masyarakat, namun lebih ke bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian skripsi saya fokus penelitian pada proses pemberdayaan masyarakat.

4. Penelitian Andriyani⁶¹ dengan laporan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)” tahun 2017 berisi bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Penglipuran dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dalam program pengembangan desa wisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat setempat selalu dilibatkan dalam diskusi mengenai program pengembangan desa wisata melalui rapat-rapat desa secara musyawarah mufakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat dalam tahap pelaksanaan diterapkan dengan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan pengunjung berupa atraksi wisata, warung yang menyediakan makanan, minuman dan cinderamata, *homestay*, serta penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Bentuk evaluasi program pengembangan desa wisata meliputi evaluasi kegiatan pelayanan wisata sehari-hari maupun kegiatan dalam acara besar lainnya. Adapun

⁶¹ Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, dan Muhamad, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)”, *JKN*, Vol. 23, No. 1, 2017, hal. 16

beberapa bentuk kendala yang dihadapi yaitu nampak sikap beberapa warga terutama generasi muda yang berusaha memodifikasi bentuk rumahnya ke gaya modern, hal ini mengubah citra desa tradisional. Kendala lainnya terkait dengan sikap masyarakat terhadap usaha dagang dan penataan lingkungan yaitu adanya masyarakat yang menjual dagangannya dengan cara mengacung atau menawarkan dagangan dengan mendatangi pengunjung wisata secara langsung sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan. Dan kendala lainnya yaitu masih sangat minimnya bimbingan dan penyuluhan terkait pengembangan pariwisata. Terkait hasil pemberdayaan masyarakat yakni, *pertama* kemampuan promosi yang sudah melalui sosial media maupun brosur, seminar dan festival. *Kedua*, kemampuan mengembangkan potensi wisata berupa atraksi wisata. *Ketiga*, menyediakan akomodasi untuk wisatawan berupa warung makan, minum, dan cinderamata serta *homestay*. *Keempat*, memberukan manfaat ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. *Kelima*, adanya perubahan mata pencaharian penduduk. *Keenam*, kenyamanan, keamanan dan kebersihan lingkungan semakin terlihat dan kondusif. *Ketujuh*, adanya perbaikan sarana dan prasarana dari pemerintah. *Kedelapan*, meningkatnya pelestarian hutan bambu sebagai objek wisata dan aset desa untuk memelihara lingkungan. Adapun bentuk implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah yakni pelestarian terhadap budaya dan adat istiadat, perubahan cara hidup dan tata nilai, dampak terhadap kehidupan sehari-

hari dan lingkungan, penguatan kehidupan beragama, serta terjaganya nilai kekeluargaan.

Persamaan: sama-sama mengkaji berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Perbedaan: obyek penelitiannya dengan penelitian saya berbeda, obyek penelitian Andriyani yaitu desa wisata tradisional dan penelitian saya yaitu agrowisata belimbing. Penelitian Andriyani juga membahas implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah, sedangkan penelitian saya tidak.

5. Menurut penelitian Citra⁶² yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir di Kabupaten Buleleng” tahun 2017 bahwa strategi pengembangan sumber pesisir untuk pemberdayaan masyarakat yaitu pembudidayaan ikan, pelestarian terumbu karang, pelatihan peningkatan pelayanan wisata, penyediaan tempat pelelangan ikan, pengadaan modal dan kerjasama bagi usaha-usaha masyarakat dalam memuat kerajinan tangan, penegakan hukum beserta sanksi.

Persamaan: menggunakan pendekatan penelitian yang sama, yaitu kualitatif deskriptif serta sama-sama meneliti strategi pemberdayaan masyarakat.

⁶² I Putu Ananda Citra, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 31-41

Perbedaan: obyek penelitian saya agrowisata berlimbing dengan pengembangan program maya juwita, sedangkan obyek penelitian Citra pada pengembangan ekowisata wilayah pesisir.

6. Menurut penelitian Sulistiyani⁶³ yang berjudul “Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri” tahun 2017 bahwa rencana kegiatan inovatif pengelolaan sampah organik di Desa Stimulyo melalui beberapa tahap, yaitu penyadaran, pengilmuan, penerapan, dan pengembangan. Tahapan pemberdayaan berhasil dilakukan kepada masyarakat di Desa Sitimulyo dengan luaran produk pupuk organik dan organisasi KPSM Ngudi Makmur dengan hasil produksi pupuk berangsur meningkat. Metode motivasi dan penyuluhan, edukasi masyarakat, konsultasi, serta pendampingan yang digunakan secara integratif merupakan metode yang saling melengkapi.

Persamaan: pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif dan memiliki kesamaan mengkaji proses pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan: fokus obyek penelitian Sulistiyani yaitu pada pengelolaan sampah mandiri, sedangkan penelitian saya pada agrowisata belimbing.

⁶³ Ambar Teguh Sulistiyani dan Yulia Wulandari, “Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabpaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri”, *Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol. 02, No. 02, 2017, hal. 146

7. Penelitian Zuliyah⁶⁴ yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menjunjung Pembangunan Daerah” tahun 2010 berisi bahwa dalam menunjang pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat desa mutlak diperlukan dari mulai tahap awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi. Upaya pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan dengan pendataan *bottom-up*. Metode yang sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat desa adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*) atau memahami Desa Secara Partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam tiap tahap kegiatan yang harus ditunjang dengan peran kepemimpinan baik formal maupun informal.

Persamaan: sama-sama meneliti strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan, selain itu persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Perbedaan: perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan obyek penelitian yang mana dalam penelitian ini objek penelitian pada segala potensi yang ada desa dalam menunjang pembangunan daerah sedangkan pada penelitian saya obyeknya pada buah belimbing dan produk olahan belimbing.

8. Penelitian Kurniawati⁶⁵ yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi” tahun 2013 berisi bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat khususnya pada Bidang

⁶⁴ Siti Zuliyah, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menjunjung Pembangunan Daerah”, *Journal of Rural and Development*, Vol. 1, No. 2, 2010, hal. 151-160

⁶⁵ Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono dan Imam Hanafi, “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 4, t.t., hal. 9-14

Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan, sebelum beralih ke tahap pelaksanaan sudah berjalan baik. Kemudian dalam tahap pelaksanaan diadakan sosialisasi kewirausahaan terkait dengan program yang akan diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah atau mikro kecil.

Persamaan: sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan menjelaskan terkait proses atau tahap pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan: perbedaan terletak pada lokasi dan obyek penelitian, yang mana penelitian Kurniawati dalam program yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat kota Mojokerto sedangkan penelitian saya dengan obyek penelitiannya agrowisata belimbing di kelurahan Karang Sari Blitar.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, penulis melimpahkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.1**Paradigma Konseptual Penelitian**

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh dan diperlukan dalam mewujudkan program Maya Juwita yang dilakukan pengelola untuk membangun dan mengembangkan agrowisata. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha yang melibatkan masyarakat untuk mengembangkan lingkungan atau potensi sekitar agar berdaya dalam mengoptimalkan agrowisata untuk kesejahteraan manusia dan mempertahankan kualitas lingkungan.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan meninjau proses dan strategi pemberdayaan melalui program Maya Juwita yang dilakukan oleh pengelola Agrowisata Belimbing Karang Sari Kota Blitar.